

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan usaha simpan pinjam pada saat ini semakin pesat sebagai lembaga keuangan dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat semakin besar, lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian di Indonesia. Lembaga keuangan ini dimaksudkan sebagai perantara bagi pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dan dengan pihak-pihak yang kekurangan dana. Dengan demikian lembaga keuangan akan bergerak dalam kegiatan perekonomian dan berbagai pelayanan jasa yang diberikan.

Usaha simpan pinjam dalam menjalankan usahanya ialah menerima dana dari pemerintah daerah dalam bentuk rekening koran dan simpanan dari anggota kemudian menyalurkan dana yang diterimanya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Makin besar jumlah uang yang dipercayakan masyarakat pada suatu usaha simpan pinjam, berarti semakin besar pula kepercayaan masyarakat kepada usaha simpan pinjam tersebut.

Pengendalian intern merupakan suatu sistematis yang dibuat oleh suatu organisasi atau badan usaha yang tujuannya untuk mencapai cita-cita perusahaan atau organisasi. Sistem pengendalian intern yang baik akan menjamin kebijakan dan tanggung jawab tugas tertentu. Dengan adanya sistem pengendalian intern merupakan kebijakan dan struktur sebagai tambahan terhadap pengendalian dan sistem akuntansi yang telah diciptakan oleh manajemen dengan keyakinan bahwa tujuan perusahaan atau organisasi tercapai.

Aktifitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan dengan baik yaitu perusahaan tugas yang cukup, otorisasi yang pantas atas transaksi aktivitas, dokumen dan catatan yang memadai, pengendalian fisik atas aset dan catatan serta pengecekan independen atas pelaksanaan.

Untuk menetapkan sasaran dan tujuan organisasi agar tercapai dengan efektif terdapat lima komponen yang dilakukan dalam pengendalian yaitu pengendalian intern terhadap lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian dan pemantauan. Dalam perencanaan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern diharapkan manajemen memiliki kepentingan yang sama dengan auditor dalam mengevaluasi sistem.

Adapun syarat-syarat pengendalian intern yang baik adalah adanya struktur organisasi yang mengadakan pemisahan fungsi pertanggungjawaban secara tepat, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang memadai yang memberikan pengawasan yang layak terhadap aset, hutang, pendapatan, biaya dan praktek yang sehat yang harus diikuti dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tiap-tiap organisasi. Tujuan dari adanya sistem pengendalian intern adalah untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Pengendalian intern kredit mutlak harus dilaksanakan untuk menghindari terjadinya kredit macet dan penyelesaian kredit macet. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan piutang (kredit) yang baik yaitu dalam bentuk kebijaksanaan kredit yang mengandung unsur pengendalian intern piutang, agar dana yang terdapat

dari para debitur dapat tertagih tepat pada waktunya sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) mandiri yaitu merupakan suatu usaha yang dimiliki oleh suatu kelurahan yang bergerak dalam usaha meminjamkan atau menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan untuk mengembangkan usahanya.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PNPM-Mandiri Perkotaan Tanjung Unggat Lestari memiliki prosedur yang harus diikuti masyarakat yang akan mengajukan pinjaman. Dijalankannya prosedur ini bertujuan untuk dapat mengendalikan kredit yang disalurkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses pemberian kredit perlu dilakukan analisa terhadap calon peminjam.

Tahap pertama, Ketua KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) mendatangi bagian UPK (Unit Pengelola Keuangan) untuk mendapatkan informasi kemungkinan mendapatkan kredit. UPK memberikan penjelasan sepenuhnya dan menyerahkan formulir atau proposal kepada ketua KSM untuk diisi dengan melampirkan berita acara pembentukan KSM, Formulir pengajuan pinjaman (form PB-01) masing-masing Anggota KSM calon peminjam yang telah ditandatangani suami/istri, dan surat kuasa pencairan tabungan anggota KSM.

Tahap kedua, Bagian UPK memeriksa kelengkapan persyaratan proposal usulan pengajuan pinjaman. Jika terdapat persyaratan yang kurang lengkap, bagian UPK memiliki wewenang untuk menolak usulan pengajuan pinjaman tersebut.

Tahap ketiga, Bagian UPK menganalisis dan menyelidiki berkas pinjaman terhadap proposal dan syarat-syarat yang telah dlampirkan oleh KSM untuk mengetahui apakah pengisian data dan syarat-syaratnya sudah sesuai denganyang diinginkan oleh pengelola PNPM-Mandiri Perkotaan Tanjung Unggat Lestari.

Tahap keempat, akan dilakukan peninjauan /pemeriksaan ke tempat tinggal dan usaha KSM/anggota untuk memastikan penggunaan dana dengan kebutuhan usaha, kebenaran nilai usaha yang diajukan, dan untuk memperoleh gambaran layak tidaknya diberikan pinjaman.

Tahap kelima, Setelah dilakukan peninjauan, seluruh pengelola PNPM-Mandiri Perkotaan Tanjung Unggat Lestari akan melakukan rapat yang akan mendiskusikan apakah KSM layak untuk mendapatkan pinjaman bergulir.

Tahap keenam, setelah semua legalisasi disetujui maka bagian UPK akan membuat Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) antara KSM calon peminjam dengan PNPM-Mandiri Perkotaan Tanjung Unggat Lestari. Setelah selesai, ketua PNPM-Mandiri Perkotaan Tanjung Unggat Lestari akan menandatangani surat perjanjian pemberian kredit tersebut. Bagian UPK akan mengundang KSM calon peminjam untuk membicarakan hasil proposal dan mengumumkan informasi mengenai jumlah dana yang akan diterima, cara pembayaran cicilan kredit, jangka waktu kredit, waktu pencairan kredit serta memberikan arahan kepada KSM sebelum kredit dicairkan.

Tahap ketujuh, bagian UPK akan mempersiapkan berkas-berkas untuk pencairan kredit, kartu pinjaman, bukti kas keluar termasuk pernyataan tanggung

renteng dan surat kuasa, dan menandatangani surat-surat/form tersebut ke pengurus KSM dan anggota.

Tahap selanjutnya, bagian UPK menyerahkan berkas kuitansi (bukti kas keluar) tersebut ke bagian kasir dan kasir akan mencairkan dana dari rekening PNPM-Mandiri Perkotaan Tanjung Unggat Lestari. Kasir menyerahkan uang ke pengurus KSM dan menandatangani bukti kas keluar (rangkap 3) dimana uang bersama tindasan 1 diserahkan ke pengurus KSM dan yang asli disimpan sebagai bukti transaksi.

Setelah KSM mendapatkan dana, tugas pengelola PNPM-Mandiri Perkotaan Tanjung Unggat Lestari adalah mengawasi bagaimana pengembalian kredit yang dilakukan peminjam. Pihak PNPM-Mandiri Perkotaan Tanjung Unggat Lestari melakukan pemantauan yaitu mengawasi bagaimana kelancaran pembayaran angsuran pinjaman dari KSM. Namun pihak PNPM-Mandiri Perkotaan Tanjung Unggat Lestari belum melakukan pemantauan yang efektif terhadap KSM.

Dapat dilihat bahwa permintaan terhadap peminjaman masyarakat yaitu PNPM-Mandiri Perkotaan Tanjung Unggat Lestari Kelurahan Tanjung Unggat meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya bantuan dana sebagai modal usaha bagi masyarakat, sehingga masyarakat sekitar menjadi produktif.

TABEL I.1
PNPM-Mandiri Perkotaan Tanjung Unggat
Daftar Posisi Kredit Bermasalah
Periode (2015-2016)

Kolektibilitas	Kriteria	Jumlah 2015 (Rp)	%	Jumlah 2016 (Rp)	%
I (0 bulan)	A	78.862.500	22.1%	116.500.000	30.4 %
II (1-3 bulan)	B	72.753.000	20.4%	30.840.000	8%
III (3-6 bulan)	C	0	0	5.425.000	1.4%
IV (>6 bulan)	D	0	0	0	0
V (>9 bulan)	E	204.829.250	57.5%	230.759.250	60.2%
Jumlah		356.444.750	100	383.524.250	100

Sumber: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM)-Mandiri Perkotaan Tanjung Unggat Lestari

Berdasarkan tabel I.1 dapat dilihat bahwa jumlah kredit yang disalurkan oleh PNPM-Mandiri Perkotaan Tanjung Unggat 2015 hingga 2016 terdapat beberapa kredit bermasalah dalam pengembaliannya pada tahun 2015 kolektibilitas I (0 bulan) dengan kriteria A yang disebut dengan kredit lancar sebesar Rp. 78.862.500 dengan persentase 22,1% ditahun 2016 terjadi peningkatan sebesar Rp. 116.500.000 dengan persentase 30,4%%, sedangkan kolektibilitas II (I-3 bulan) dengan kriteria B yang disebut dengan kredit dalam perlu perhatian ditahun 2015 sebesar Rp. 72.753.000 dengan persentase 20,4% ditahun 2016 terjadi penurunan sebesar Rp. 30.840.000 dengan persentase 8%, kolektibilitas III (3-6 bulan) dengan kriteria C yang disebut dengan kredit kurang lancar ditahun 2015 sebesar Rp 0 dengan persentase 0% di tahun 2016 terjadi peningkatan sebesar Rp. 5.425000 dengan persentase 1,4%, Kolektibilitas IV (>6 bulan) dengan kriteria D yang disebut dengan kredit diragukan ditahun 2015 tidak terdapat tunggakan dengan persentase 0 % ditahun 2016 tetap tidak terdapat

tunggakan dengan persentase 0 % dan terakhir kolektibilitas V (>9 bulan) dengan kriteria E yang disebut dengan kredit macet ditahun 2015 sebesar Rp. 204.829.250 dengan persentase 57,5% dan ditahun 2016 terjadi peningkatan sebesar Rp. 230.759.250 dengan persentase 60,2%.

Berdasarkan tabel kolektibilitas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan persentase kredit bermasalah terutama kredit macet. Berdasarkan survey awal pada PNPM-Mandiri Perkotaan Tanjung Unggat Lestari bahwa kredit yang bermasalah ini meningkat karena rata-rata usaha yang dijalankan oleh para KSM peminjam mengalami penurunan pendapatan/penghasilan sehingga menyebabkan kemampuan KSM untuk membayar angsuran menjadi berkurang.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis melakukan analisis dengan judul **“ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PEMBERIAN KREDIT PADA PNPM-MANDIRI PERKOTAAN TANJUNG UNGGAT LESTARI KELURAHAN TANJUNG UNGGAT KOTA TANJUNG PINANG”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, Maka yang menjadi permasalahan pokok dalam Penelitian ini sebagai berikut :

“Bagaimana efektifitas penerapan sistem pengendalian intern terhadap pemberian kredit Pada PNPM-Mandiri Perkotaan Tanjung Unggat Lestari kelurahan Tanjung Unggat Kota Tanjung Pinang”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui aktivitas dan efektifitas pengendalian intern dalam penyaluran kredit pada PNPM-Mandiri Perkotaan Tanjung Unggat Lestari kelurahan Tanjung Unggat Kota Tanjung Pinang.

2. Manfaat Penelitian:

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Hasil penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan khususnya tentang pengendalian intern penyaluran kredit pada PNPM-Mandiri Perkotaan Tanjung Unggat Lestari kelurahan Tanjung Unggat Kota Tanjung Pinang .
- b) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan masukan bagi pihak PNPM-Mandiri Perkotaan Tanjung Unggat Lestari Kelurahan Tanjung Unggat Kota Tanjung Pinang dalam menciptakan pengendalian intern yang baik terhadap penyaluran kredit yang dapat diberikan secara efektif.
- c) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pemikiran baru dan sumber bahan informasi untuk para peneliti yang ingin melakukan terhadap masalah yang sama dimasa akan mendatang.

D. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
- Menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.
- BAB II : Telaah Pustaka dan Hipotesis
- Mengemukakan tinjauan pustaka yang berhubungan dengan penulisan serta hipotesis.
- BAB III : Metode Penelitian
- Menjelaskan tentang metode dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.
- BAB IV : Gambaran Umum Perusahaan/Organisasi
- Menjelaskan tentang sejarah singkat PNPM-Mandiri Perkotaan Tanjung Unggat Lestari kelurahan Tanjung Unggat kota Tanjung Pinang, Struktur organisasi dan aktivitas lembaga.
- BAB V : Hasil dan Pembahasan Penelitian
- Membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan.
- BAB VI : Penutup
- Terdiri atas kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh dari bab-bab sebelumnya.